

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan politisasi identitas. Hal tersebut dikarenakan latar belakang etnis dan agama antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sangat berbeda, dimana Anies beragama Islam serta keturunan arab sedangkan Basuki Tjahaya Purnama beragama Katolik dan keturunan tionghoa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasangan Anies-Sandi merepresentasikan muslim pribumi dan orang-orang yang memiliki keturunan etnis arab, sedangkan pasangan Basuki-Djarot merepresentasikan non-muslim dan orang-orang yang memiliki keturunan etnis tionghoa.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Republik Indonesia, pada masa penjajahan kolonial, Belanda membuat undang-undang kependudukan yang memposisikan warga pribumi sebagai inlander atau warga kelas rendah sementara warga tiongkok menduduki kelas atas dan mendapatkan akses ekonomi yang tidak diberikan kepada penduduk pribumi. Menurut Nasrudin, perlakuan diskriminatif tersebut membuat masyarakat pribumi memendam kemarahan terhadap etnis cina.<sup>2</sup> Bahkan kemarahan tersebut pun pernah diluapkan pada saat kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13 Mei - 15 Mei tahun 1998 dimana banyak toko serta perusahaan milik keturunan tionghoa yang dirusak serta dijarah oleh massa.<sup>3</sup>

Banyak masyarakat yang menilai kepemimpinan Ahok berhasil dengan beberapa kebijakannya seperti melarang PKL di sekitar monas, penataan Kalijodo, membuat Ruang Publik Terpadu

---

<sup>1</sup> Nasrudin, "Politik Identitas dan Representasi Politik Studi Kasus pada Pilkada DKI 2018-2022" *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: hlm.45

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lavender, "Sejarah Peristiwa Kerusuhan Mei 1998", <https://mediaindonesia.com/megapolitan/491952/sejarah-peristiwa-kerusuhan-mei-1998>, diakses pada 27/07/2022

Ramah Anak (RPTRA), membentuk pasukan oranye, relokasi Kampung Pulo, melarang kendaraan bermotor di jalan Sudirman-Thamrin serta membuat Simpang Susun Semanggi.<sup>4</sup> Meski begitu, banyak pula kalangan yang tidak menyukai kepemimpinan Ahok sebagai gubernur.

Pasalnya, Ahok seringkali berkata kasar bahkan di depan media sekalipun, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, ada yang menilai sikap seperti itu pertanda tegas namun ada pula yang menilai sikap seperti itu tidak baik dicontoh terlebih Ahok merupakan seorang pejabat Ibukota pada saat itu. Bahkan terdapat salah satu anggota partai Golkar yang tidak segan segan menyebutkan bahwa kepemimpinan Ahok merupakan kepemimpinan terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Namun apa yang disuarakan oleh politisi tersebut mendapat balasan yang sangat tajam dari publik, dimana publik banyak menilai kepemimpinan Ahok justru patut menjadi contoh baik dalam sejarah Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Memasuki tahun-tahun politik pada tahun 2016 bibit orientasi kecenderungan politik mulai muncul, pemilihan gubernur DKI Jakarta pada saat itu menjadi awal mula kemunculan politik identitas ke mata masyarakat luas. Dua kandidat yang sangat diunggulkan memiliki perbedaan baik dari latar belakang etnis maupun agama, sehingga para pendukung pun perlahan mulai terbagi menjadi dua kubu. Kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam panggung politik pada saat itu membuat pemilihan Gubernur tersebut dibagi menjadi dua putaran.

Nomor Urut	Calon gubernur dan wakil gubernur	Partai politik	Jargon
1	Agus Harimurti Yudhoyono Sylviana Murni	Pengusung: Demokrat, PPP, PKB, PAN.	JAKARTA UNTUK RAKYAT

<sup>4</sup> Prastiwi, "7 Hasil Kinerja Ahok yang Sempat Bikin Heboh", <https://www.liputan6.com/news/read/3805099/7-hasil-kinerja-ahok-yang-semapat-bikin-heboh>, diakses pada 27/07/2022

<sup>5</sup> Populis, "Sebut Ahok Gubernur DKI Jakarta Terburuk Sepanjang Sejarah Hingga Ditiru PSI, Politisi Golkar Ini Kena Amuk", <https://populis.id/read20088/sebut-ahok-gubernur-dki-jakarta-terburuk-sepanjang-sejarah-hingga-ditiru-psi-politisi-golkar-ini-kena-amuk>, diakses pada 27/07/2022.

		Pendukung: PMB, Buruh, Pelopor, PKNU, PKDI, PPDI, Pakar Pangan	
2.	Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat	Pengusung: PDI-P, Golkar, Hanura, Nasdem.  Pendukung: PKPI, PSI.	KERJA KERAS KERJA HEBAT
3.	Anies Baswedan Sandiaga Salaudidin Uno	Pengusung: Gerindra, PKS  Pendukung: Perindo, Idaman	JAKARTA MAJU BERSAMA

1.1 Tabel Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

Hal itu dikarenakan hasil yang belum mencapai 50+1 dimana pada putaran pertama pasangan Basuki – Djarot mendapatkan suara tertinggi dengan hasil 42,99%, diikuti oleh Anies – Sandi dengan 39,95%, kemudian Agus – Sylvie yang hanya mendapatkan 17,02%,<sup>6</sup> angka yang jauh dari kedua pasangan calon lawannya. Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang terpilih.

<sup>6</sup> Fardiansyah, “Ini Hasil Pilgub DKI Putaran Pertama”, <https://megapolitan.okezone.com/read/2017/03/04/338/1634341/ini-hasil-pilgub-dki-putaran-pertama>, diakses pada 26/12/2022

Cagub-Cawagub	Putaran 1 <sup>7</sup>	
	Pemilih	%
<a href="#">Agus – Sylvi</a>	937.955	17,06%
<a href="#">Ahok – Djarot</a>	<b>2.364.577</b>	<b>42,99%</b>
<a href="#">Anies – Sandi</a>	2.197.333	39,95%
Jumlah suara sah	5.499.865	100,00%

1.2 Tabel Perolehan Suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama

Namun, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memiliki keistimewaan dengan adanya Undang-Undang Kekhususan Nomor 29 Tahun 2007 dimana apabila suara calon kepala daerah tidak mencapai diatas 50% maka diadakan pemilihan putaran kedua, hal tersebut dikarenakan Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup> Permasalahan muncul ketika kunjungan calon Gubernur Petahana kala itu yaitu Ahok ke Pulau seribu dengan pidatonya yang dianggap menista agama Islam. Hal itu terkait dengan tuduhan telah menyalahartikan makna dari surat Al-Maidah ayat 51 yang menjelaskan tentang kepemimpinan.

Akibatnya beliau divonis oleh mayoritas kalangan umat islam sebagai “penista agama” dan menimbulkan gerakan yang diikuti oleh ratusan ribu hingga jutaan peserta yaitu Aksi Bela Islam yang dilakukan tiga kali; pada tanggal 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016.

<sup>7</sup> Wikipedia, Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Gubernur\\_DKI\\_Jakarta\\_2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_DKI_Jakarta_2017), diakses pada 06/03/2023

<sup>8</sup> Yulianto, “Ini Cara Menentukan Pemenang Pilkada”, <https://www.republika.co.id/berita/qfgwrz396/ini-cara-menentukan-pemenang-pilkada>, diakses pada 18/5/2022

Mereka menuntut pemerintah serta aparat pada saat itu untuk memproses hukum Ahok atas tuduhan penistaan agama yang dilakukannya. Aksi tersebut diinisiasikan oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang kemudian diikuti serta didukung oleh kalangan ormas seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta puluhan organisasi islam lainnya.<sup>9</sup>

Selain itu, beberapa tokoh maupun ulama muslim seperti Habieb Rizieq menjadi inisiator terjadinya gerakan Aksi Bela Islam tersebut dan diantara ketiga aksi yang terjadi, Gerakan 2 Desember 2016 (212) menjadi yang terbesar bahkan dibuat secara berjilid-jilid dan melekat di ingatan masyarakat serta sejarah Republik Indonesia. Aksi tersebut juga membawa dampak bagi perpecahan di kalangan internal umat Islam, dimana ketua NU maupun Muhammadiyah mengimbau warganya agar tidak ikut serta dalam aksi, namun ternyata banyak dari pengikut kedua golongan tersebut yang turun pada Aksi Bela Islam khususnya 212. Nampaknya politik identitas telah menemukan momentum untuk muncul pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Seorang pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia, yaitu Effendi Gazali mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta merupakan pemilihan yang paling brutal dilihat dari segi konteks demokrasi di media sosial, yang mana hal tersebut membuat netizen terbelah menjadi dua kubu yang saling melempar opini negatif sampai kampanye hitam. Bahkan di beberapa tempat terdapat spanduk yang menyatakan bahwa “haram untuk menyolatkan jenazah pendukung nonmuslim”

Dimana hal itu ditujukan kepada kaum muslim yang masih mendukung Ahok baik sebelum atau setelah terjadinya kasus penistaan agama yang menimpanya, karena beberapa kaum muslim

---

<sup>9</sup> Frenki, “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontes Politik Pada Pemilihan Umum di Indonesia”, *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Vol 11, No1 (2021)*, hlm. 41

berpendapat apa yang diucapkannya bukan sebuah kasus penistaan, bahkan beberapa kalangan menilai bahwa dalam hal memilih pemimpin, politik dan agama harus dipisahkan.<sup>10</sup> Kemunculan politik identitas dalam arena politik, selain sebagai cara untuk membentuk kesatuan dan solidaritas kelompok, juga merupakan potensi munculnya konflik dengan kelompok identitas lainnya.

Hal ini terjadi karena politik identitas akan mengarahkan kelompok identitas hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Akibatnya, kelompok identitas ini berpotensi menjadi eksklusif dan hanya akan bertindak dengan menggunakan rasionalitas kelompok. Kelompok lain yang tidak setuju akan dianggap sebagai “liyan” yang perlu dilawan. Bahkan ketika sudah berada pada ranah yang ekstrim, kelompok identitas ini berpotensi pada munculnya konflik komunal, fanatisme, serta gerakan separatism.<sup>11</sup>

Kemenangan pasangan Anies-Sandi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu memberikan gambaran bahwa politik identitas khususnya identitas muslim menjadi faktor baru dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum.

Cagub-Cawagub	Putaran 2 <sup>12</sup>	
	Pemilih	%
Ahok – Djarot	2.350.366	42,04%
Anies – Sandi	<b>5.591.353</b>	<b>100,00%</b>

<sup>10</sup> Sugiharto, “Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta”, <https://metro.tempo.co/read/1045103/kaleidoskop-2017-pilkada-brutal-gubernur-dki-jakarta/full&view=ok>, diakses pada 19/5/2022

<sup>11</sup> Afala, *Politik Identitas di Indonesia*, Malang: UB Press, 2020, hlm. 41-43

<sup>12</sup> *Op.cit.*

Melihat itu, baik dari para politisi, tim pemenangan, tokoh-tokoh, bahkan sampai kepada calon Presidennya sendiri pun menggunakan identitas muslim dalam upaya memenangkan pertarungan Pemilihan Presiden 2019. Identitas muslim setidaknya menjadi faktor yang penting dalam meraih suara, baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo sama-sama memanfaatkan identitas ini sebagai “alat” utama dalam meraih suara.

Hal itu terlihat dari dua hal, pertama para pendukung Prabowo yang banyak berasal dari ormas-ormas Islam, sebut saja FPI, FUI, dan GNPF yang kemudian menghasilkan Ijtima Ulama dalam pemilihan Wakilnya. Kedua dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai Wakil dari Jokowi yang membuat umat Islam terbagi menjadi dua kubu. Pemilihan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden juga sekaligus mematahkan stigma bahwa Jokowi adalah sosok yang anti terhadap umat Islam. Pemilihan KH. Ma'ruf Amin sebagai wakil dari Jokowi merupakan suatu hal yang begitu mengejutkan.

Bagaimana tidak, pasalnya sejumlah nama dirumorkan akan mendampingi Jokowi pada kontestasi Pemilu 2019 lalu, sebut saja Mahfud MD. Namun ketika saingannya yaitu Prabowo yang sudah digadang-gadang akan didampingi oleh seseorang yang pandai dalam agama, secara mengejutkan Jokowi mengumumkan bahwa KH. Ma'ruf Amin yang akan menjadi wakilnya. KH. Ma'ruf Amin sendiri pada saat itu menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga merupakan pimpinan Nahdatul Ulama.

Pada kasus Ahok waktu itu beliau menerbitkan fatwa penistaan agama terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, selain itu beliau juga mengeluarkan fatwa menentang paham sekulerisme, liberalism, dan pluralism, serta sikap konservatismenya dalam menentang kelompok

minoritas Ahmadiyah, kaum LGBT, serta mendukung UU Pornografi.<sup>13</sup> Namun nampaknya apa yang terjadi pada kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu tidak mempengaruhi keputusan Jokowi serta timnya untuk memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai wakil, hal itu dilakukan juga untuk mendapatkan suara dari kalangan umat muslim.

Sedangkan itu dari pihak sebelah, Prabowo digadang-gadang akan dipasangkan dengan seorang ulama atau yang pandai dalam beragama akhirnya memilih Sandiaga Salahuddin Uno yang mana saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan, beliau juga merupakan seorang pengusaha dan politisi berpendidikan Katolik dan Barat. Dengan latar belakang Pendidikan yang seperti itu, sempat menjadi 'bahan' untuk menyerang pasangan Prabowo-Sandi, meski begitu, kalangan pendukung Prabowo tidak banyak berubah, para pendukungnya tetap beranggapan bahwa Prabowo merupakan harapan agar pemerintahan Indonesia bisa lebih baik lagi bahkan tidak anti terhadap agama Islam.

Bahkan agar Prabowo tidak kehilangan suaranya, salah satu partai pengusung Prabowo yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan label santri secara langsung kepada Sandiaga Salahuddin Uno oleh presidennya kala itu yaitu Muhammad Sohiful Iman.<sup>14</sup> Akibat dari timbulnya pembelahan ditengah umat muslim yang begitu masif dan kuat, tidak segan-segan penyebutan Kafir dilontarkan bagi mereka yang tidak sepaham dengan pilihan politiknya, membuat istilah "kafir" keluar dari makna yang sebenarnya dalam Islam.

---

<sup>13</sup> Andrew, "Pemilu Presiden 2019: Polarisasi Politik dan Komodifikasi Identitas Agama di Media Sosial", <https://www.indonesiana.id/read/154718/pemilu-presiden-2019-polarisasi-politik-dan-komodifikasi-identitas-agama-di-media-sosial>, diakses pada 11/07/2022

<sup>14</sup> Kompas, "Label Santri "Post-Islamisme" untuk Sandi, Asa Terakhir PKS", [https://www.kompasiana.com/yonbayu/5b70dcb9bde5757ac4249685/label-santri-post-islamisme-untuk-sandi-asa-terakhir-pks?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yonbayu/5b70dcb9bde5757ac4249685/label-santri-post-islamisme-untuk-sandi-asa-terakhir-pks?page=2&page_images=1), diakses pada 31/07/2022

## 1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan politik identitas pada masa kampanye merupakan hal yang wajar untuk meraih suara dalam suatu persaingan politik, terlebih pada momen pemilu. Kembali pada konsep politik itu sendiri yang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dan juga kepentingan. Artinya merupakan bagian dari strategi politik pemenangan. Permasalahannya ialah ketika penggunaan politik identitas itu terus menerus dilakukan bahkan sampai mendoktrinasi masyarakat sehingga melupakan keberagaman masyarakat Indonesia. Terlebih ketika sudah mencapai tahap yang sangat ekstrim dimana doktrinasi oknum-oknum yang menyatakan tidak boleh mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu bahkan dicap kafir dan munafik.

Tentu saja hal itu berdampak bukan hanya kebencian terhadap Capres atau Cawapres saja, tetapi bisa menyebabkan perpecahan serta kebencian ditengah masyarakat. Kerusuhan-kerushan yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik yang sifatnya etnis atau keagamaan (seperti pelarangan pembangunan tempat ibadah) seringkali muncul ke permukaan media-media nasional pasca terjadinya Pemilihan Presiden 2019. Ujaran kebencian masih sering terjadi, baik antar penganut agama lain maupun di dalam internal agama itu sendiri. Melihat dari konflik yang terjadi dari sebelum, saat, dan setelah kejadian Pemilihan Presiden 2019 yang juga melibatkan banyak pihak baik dari para politisi, pejabat publik, tokoh masyarakat, ormas-ormas, sampai kepada masyarakat, maka:

1. Bagaimana penggunaan politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017?
2. Apakah politik identitas itu masih berpengaruh pada Pemilihan Presiden 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena politik identitas di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 2017-2019.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan praktis.

### Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi akademis mengenai politik identitas di jurusan ilmu politik pada khususnya dan civitas akademik universitas nasional pada umumnya dan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai politik identitas yang terjadi sebelum, saat, maupun setelah terjadinya Pemilihan Presiden 2019.

### Manfaat Praktis

Untuk memenuhi tugas sebagai syarat-syarat mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional (UNAS).

## 1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab berisi:

### Bab 1 Pendahuluan:

Menggambarkan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian mengenai politik identitas yang terjadi saat masa-masa Pemilu dari tahun 2016 (Pemilihan Gubernur DKI Jakarta) sampai tahun 2019 (Pemilihan Presiden)

### BAB 2 Studi Pustaka:

Bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu oleh orang lain mengenai politik identitas di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memiliki satu tema yang sama yakni mengenai kemunculan politik identitas di Indonesia.

### BAB 3 Metodologi Penelitian:



Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

#### BAB 4 Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh atau Lembaga yang terkait.

#### BAB 5 Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian.

